

**SYSTEM DEMOKRASI DALAM PANDANGAN
ISLAM SERTA INTELEKTUAL MUSLIM DAN
PENERAPANNYA DI INDONESIA**

**Dosen Pengampu :
Dr. H. Dwi Surya Atmaja, MA
Wahyu Nugroho, MH**



**Disusun Oleh :
SATINA
(12001019) 5A**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
2023**

SYSTEM DEMOKRASI DALAM PANDANGAN ISLAM SERTA INTELEKTUAL MUSLIM DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA

Abstrak

Masih umum bagi orang untuk tidak setuju dengan satu sudut pandang. Banyaknya perbedaan dari suatu tetap tidak mengubah pandangan kita yang tentu saja lebih mengutamakan Al-Qur'an dan Hadis. Demokrasi adalah sistem di mana rakyat memiliki otoritas paling besar. Musyawarah mendahulukan kesepakatan bersama dalam demokrasi. Hak kebebasan dalam memilih dan mengutarakan pendapat. Di dalam Islam juga mengajarkan arti penting bagaimana muslim sejati salah satunya mempunyai kebebasan dalam memilih dan bersuara akan tetapi tetap di dalam garis Islam yang tidak melanggar hukum maupun syari'at Islam. Dalam penelitian ini adapun tujuan pembahasannya adalah tentang bagaimana Demokrasi di Indonesia dalam pandangan Intelektual muslim. Hal ini menjadi pembahasan bagaimana kita sebagai umat muslim yang tinggal di negara demokrasi akan tetapi tanpa melanggar hukum Islam.

Kata Kunci: *Demokrasi, Intelektual, Islam, Musyawarah.*

PENDAHULUAN

Agama Islam adalah agama sebenar-benarnya yang mengajarkan arti kebenaran. Kebenaran yang dimaksud berkaitan dengan hukum, sosial, dan kejelasan dunia. Sudah barang tentu mereka wajib menjunjung tinggi syariat Islam yang dilandasi oleh Hadits dan Al-Qur'an. Demokrasi ditampilkan dalam salah satu pembahasan dalam artikel ini. Seperti yang telah kita ketahui, Demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana menjunjung tinggi hak rakyat. Hak rakyat yang dimaksud ialah mempunyai hak untuk kebebasan, hak untuk bersuara atau mengutarakan pendapat, menghargai perbedaan dan intinya adalah demokrasi ini keputusan atau kekuasaan tertinggi itu oleh rakyat dan untuk rakyat. Maksudnya adalah mengutamakan musyawarah sebagai hasil keputusan bersama.

Tentu saja ada perbedaan antara Islam dan sistem demokrasi yang berlaku saat ini karena Islam didirikan di atas kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah Nabi (Hadis Nabi). Khususnya di Indonesia juga menganut sistem pemerintahan demokrasi. Dari hal ini terdapat pro dan kontra atau perbedaan pendapat tentang bagaimana sistem demokrasi terhadap Islam. Suatu perbedaan ini bisa menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini. Bagaimana tanggapan intelektual muslim dalam memandang suatu sistem demokrasi di Indonesia. Oleh sebab itu maka dapat ditarik permasalahan-permasalahan apakah Islam menerima sistem demokrasi, Bagaimana pandangan Islam tentang sistem demokrasi ini, Bagaimana menurut pandangan intelektual muslim tentang sistem demokrasi dan bagaimana penerapan demokrasi ini di Indonesia.

Berbagai isu dan masalah menjadikan adanya penulisan artikel ini. Sebagai salah satu masyarakat Indonesia yang menganut sistem demokrasi, bagaimana keselarasan antara suatu pendapat atau dalam suatu pandangan yang berbeda antara sistem demokrasi dan Islam. Tentu saja dalam hal ini ada perbedaan salah satu contoh dimana demokrasi ini menggunakan suara terbanyak akan menjadi pemenang, akan tetapi berbeda dalam pandangan Islam. Islam lebih melihat dari sudut pandang kebenaran. Bagaimana bisa suara terbanyak lebih di utamakan di banding dengan suatu kebenaran. Ini merupakan salah satu contoh perbedaan antara sudut pandang antara demokrasi dan Islam.

Untuk itulah peneliti berusaha menjawab permasalahan-permasalahan tersebut dalam tulisan ilmiah ini. Adapun masalah atau isu yang dapat di angkat ialah sistem demokrasi dalam pandangan Islam serta intelektual muslim dan penerapannya di Indonesia. Penelitian artikel ini sangat di perlukan untuk di teliti karena sangat sulit di pungkiri

bagaimana cara agar kita bisa membedakan antara urusan agamawi dan suatu sistem yang telah di tuntutan oleh negara.

METODE.

Bentuk Penelitian: Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data sekunder. Untuk dokumentasi dan kajian literatur, sumber data sekunder meliputi media cetak dan online, catatan lapangan, dan sumber lainnya. Sumber data sekunder, juga dikenal sebagai sumber data tidak langsung, dapat memperkaya dan meningkatkan data penelitian. Penelitian kualitatif ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang masalah penelitiannya dideskripsikan sehingga peneliti dapat memberikan penjelasan yang sistematis tentang masalah tersebut.

Sumber data tersier adalah sumber data yang mengandung informasi yang berfungsi sebagai pedoman untuk memperoleh literatur primer dan sekunder. Contoh sumber data tersier antara lain: resensi, direktori, bibliografi, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, sumber data tersier adalah bahan bacaan lain seperti karya ilmiah, literatur, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Teknik pengumpulan data yaitu melalui Dokumen. Dokumen tersebut bisa sebagai informasi pembahasan yang menjadi topik dalam penulisan artikel ini.

Alat pengumpulan data artikel ini adalah alat dokumentasi (seperti buku harian, buku, dan majalah). Data diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu proses pencarian dan penyusunan data secara berurutan berdasarkan data yang diperoleh dari e-mail, catatan, dan bahan lainnya, sehingga dapat dengan mudah dipahami sebagai penjelasan tentang Sistem Demokrasi di Indonesia. Pandangan Islam dan Cendekiawan Muslim serta Penerapannya di Indonesia. Setelah peneliti memperoleh data yang diperlukan, data tersebut diolah dan dianalisis. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, khususnya dalam bentuk pernyataan dan deskripsi, untuk menggunakan metode analisis induktif. Metode analisis data melalui serangkaian langkah yang telah ditentukan, meliputi identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi deskriptif.

1. PENGERTIAN DEMOKRASI

Arti harfiah dari demokrasi, seperti yang didefinisikan oleh Miriam Budiarto (1977), terdiri dari dua kata: "demos" yang diterjemahkan menjadi "rakyat", dan "kratos" yang berarti "kekuasaan" "pemerintahan atau pemerintahan oleh rakyat". atau "pemerintahan rakyat" adalah dua definisi lain dari demokrasi. Istilah "Pemerintahan Rakyat" digunakan secara historis untuk merujuk pada "kata demokrasi" di Yunani Kuno, Roma, dan Italia. Seperti yang telah kita lihat, orang Yunani menemukan istilah "demokrasi" dengan menggunakan istilah "pemerintahan rakyat". Orang Italia memberi "pemerintahan rakyat" di beberapa kota nama "Negara Kota", Terlepas dari kenyataan bahwa orang Romawi memberi nama "Republik" kepada pemerintah mereka setelah bahasa Latin asli mereka, demokrasi masih menjadi harapan dan bahkan mungkin impian bagi sebagian orang. Dengan kata lain, demokrasi dianggap mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi rakyat. (Istianto, 2011).

Demokrasi dan hukum didirikan untuk melawan kesewenang-wenangan kekuasaan yang menganut sistem absolut dan mengabaikan hak-hak rakyat. Demokrasi adalah pemerintahan yang dijalankan oleh, untuk, dan tentang rakyat. (Hakim, 2011).

"Menjamin kesetaraan dan kebebasan mendasar, memberdayakan rakyat biasa, menyelesaikan perselisihan melalui dialog damai, menghormati perbedaan, dan mewujudkan reformasi politik dan sosial tanpa konflik" adalah gambaran Landman tentang demokrasi yang ideal. Demokrasi mendorong ekspresi bebas dari preferensi dan kepentingan serta aliran informasi yang bebas karena memberikan suara yang setara kepada warga negara. (IDEA, 2018).

Dalam demokrasi, rakyat memiliki kendali atas kedaulatannya sendiri dan bertanggung jawab untuk membuat keputusan bersama. Demokrasi diatur oleh, untuk, dan dengan memikirkan rakyat. (Penyusun, 2020).

Sampai saat ini, pemilihan umum (pemilu) diterima sebagai alat kelembagaan demokrasi yang valid dan ukuran bagaimana sistem politik demokrasi bekerja. Suara atau kehendak rakyat menjadi dasar pemilihan pejabat publik legislatif dan eksekutif melalui pemilu. Jika mekanisme pemilihan yang diadakan secara teratur untuk sirkulasi

elit hadir, sistem politik dikatakan demokratis. Kedaulatan rakyat menjadi ciri utama dalam sistem demokrasi (Ruhijat, 2019).

Menurut definisi di atas, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyat. Karena rakyat memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya, pemerintah perlu mengikutsertakan mereka dalam pengambilan keputusan juga. Karena demokrasi tidak termasuk monarki atau kekuasaan absolut yang tidak dibatasi oleh undang-undang, maka pemerintahan negara sangat dipengaruhi oleh sistem demokrasi. Indonesia mengikuti sistem demokrasi berdasarkan Pancasila, seperangkat lima prinsip, dan UUD 1945. Akibatnya, kita wajib menaati Pancasila dan UUD 1945.

2. Pengertian Intelektual

Intelektual dalam Bahasa Arab berarti ‘Ulul Al Albab’ artinya seseorang yang mempunyai serta memanfaatkan daya pikirnya untuk melaksanakan segala aktivitas atau kegiatannya. Menurut sudut pandang yang berbeda, seorang intelektual adalah seseorang yang memiliki banyak pengetahuan atau kecerdasan yang tinggi. Kecerdasan dalam aspek pengetahuan yaitu dapat memahami dari segi fikirannya seseorang tersebut bertindak secara rasional atau pemikirannya berdasarkan nalar yang masuk akal.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa untuk mendekati diri kepada Allah SWT secara kualitatif maka tujuan pertama pendidikan haruslah kesempurnaan manusia. kedua, menjadi kesempurnaan manusia agar dapat hidup bahagia baik sekarang maupun di masa depan. Al-Ghazali mengatakan bahwa kebahagiaan di dunia dan akhirat adalah hal yang paling utama bagi manusia. (Tambak, 2011).

Intelektual adalah sesuatu yang berhubungan dengan akal dan kecerdasan seseorang untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi. Dalam implementasinya intelektual ini ketika seseorang menggunakan daya pikirnya lebih masuk akal, dapat diterima. Kecerdasan Intelektual ini bisa diukur dengan tingkat Intelligence Quotient (IQ) seseorang melalui tes IQ.

Sebagai manusia kita diberi kelebihan untuk berpikir, menjadi ciptaan yang sempurna dikarenakan manusia berbeda dengan makhluk yang lain. Perbedaan inilah yang menjadikan manusia ciptaan yang sempurna yaitu akal. Oleh sebab itu, hendakla kita bersyukur atas karuni Allah SWT yang maha segala-gala-Nya. Menjadikan manusia makhluk yang sempurna yang memiliki Akal pikiran, Intelektual sebagai daya pikir yang lebih ke arah logika, kecerdasan dalam pengetahuan.

Cara pandang yang menggambarkan diri sebagai seorang muslim yang intelektual dengan tujuan penting mencapai kesempurnaan. Menjadi seorang muslim adalah cara memandang diri sendiri dalam hubungannya dengan Allah SWT. Selain itu, ada pemikiran-pemikiran yang bersumber dari intelektual muslim tentang bagaimana meraih kesuksesan hidup dan akhirat. Menjadi sosok muslim sejati tidak hanya taat dalam bentuk ibadah sholat atau sebagainya akan tetapi juga ilmu pengetahuan seperti pemikiran intelektual muslim dalam ilmu pengetahuan juga bernilai ibadah.

3. Sistem Pemerintahan Demokrasi Di Indonesia

Jika demokrasi suatu sistem yang didukung oleh demokrasi nasional, maka akan kuat kokoh apabila disokong oleh demokrasi (Amanulloh, 2015). Bangsa Indonesia adalah bangsa yang demokratis. Pemahaman demokrasi Indonesia saat ini antara lain dipengaruhi oleh konsep demokrasi modern. Terjadi pergeseran dan pola yang berbeda sejak kemerdekaan hingga masa reformasi demokrasi. Gagasan demokrasi ini dipraktikkan dengan cara yang berbeda di berbagai negara di seluruh dunia. (Noviati, 2013).

Dalam 16 tahun sejak era reformasi Indonesia dimulai, topik ini, apalagi soal demokrasi disana, publik sangat tertarik. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia sangat memperhatikan masa transisi menuju kehidupan politik yang lebih baik. Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut. Sejarah Indonesia dapat dibagi menjadi empat periode sesuai dengan perkembangan demokrasi: 1) Periode I Republik Indonesia, juga dikenal sebagai demokrasi konstitusional, yang menekankan peran parlemen dan partai dan disebut sebagai "Demokrasi Parlemen." 2) Masa II Republik Indonesia, juga dikenal sebagai demokrasi terpimpin, menunjukkan "beberapa aspek demokrasi rakyat" dan menyimpang dari demokrasi konstitusional dalam banyak hal. 3) Masa Republik Indonesia Ketiga: Khususnya masa Demokrasi Pancasila, demokrasi konstitusional dengan sistem presidensial. (badan presidensial sangat dominan, parlemen dibuat tidak berdaya, dan kekuasaan presiden menjadi tidak terkendali), 4) Periode Republik Indonesia Keempat: yaitu periode Demokrasi Pancasila setelah reformasi MPR melakukan empat kali amandemen UUD 1945 antara tahun 1999 dan 2002, sehingga mengurangi kewenangan lembaga presiden dan meningkatkan kewenangan DPR. Sifat demokrasi adalah berkembang seiring dengan perubahan sosial. (Sunarso, 2015).

Sebagai sistem politik, demokrasi mencakup pembagian kekuasaan (kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif),

pemerintahan konstitusional, perlindungan hak asasi manusia, pengawasan administrasi negara, pemilihan umum yang bebas, dan supremasi hukum. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi di Indonesia yang mengutamakan kepentingan seluruh masyarakat melalui musyawarah dan mufakat. Hal itu didasarkan pada nilai-nilai sosial budaya bangsa. (Dr. I Putu Ari Astawa, S.Pt, 2017).

Demokrasi adalah suatu sistem yang dianut oleh Indonesia. Sistem pemerintahan ini mengutamakan rakyatnya untuk pengambilan keputusan. Dalam implementasinya di Indonesia contohnya pemilu. Dimana dapat dilihat pentingnya suara rakyat. Indonesia berprinsipkan dengan ideologi Pancasila yang menuntut kedamaian, kebersamaan, keadilan, serta keselarasan dalam hal bersuara.

Jika dilihat dari sistem bagaimana demokrasi itu berjalan dapat dilihat sangat adil apabila diterapkan dengan baik oleh pemerintah. Karena didalam suatu negara khususnya Indonesia demokrasi ini hak bersama, maksudnya adalah mengutamakan musyawarah bersama. Dan yang paling terpenting adalah mengambil suatu keputusan juga tidak memberatkan dari sisi rakyatnya. Akan tetapi apakah Demokrasi di Indonesia sudah sesuai dengan apa yang telah dianut oleh Indonesia sendiri? Hal ini menjadi pertanyaan banyaknya masyarakat yang merasa tidak adil. Contoh kasusnya seperti disaat pemilu itulah kesempatan dari orang yang mencalonkan dirinya untuk menggunakan masyarakat yang memiliki ekonomi yang rendah, mereka membayar masyarakat tersebut untuk memilih dirinya agar menjadi pemegang kekuasaan sesuai keinginannya. Selain itu juga ada kasus dimana intimidasi terjadi oleh masyarakat dimana pihak mencalonkan diri mengancam agar tidak memilih orang lain selain dirinya.

Dari beberapa contoh diatas apakah dapat dikatakan Indonesia sudah sesuai dengan sistem demokrasi tersebut. Hal ini kembali lagi kepada kesadaran manusia masing-masing karena sesungguhnya itu bisa dinilai mana yang baik dan mana yang buruk.

4. Pandangan Intelektual Muslim Terhadap Demokrasi Di Indonesia

Pandangan ialah suatu cara berpikir seseorang yang menurutnya benar. Pandangan dalam intelektual dapat di artikan sebagai cara berpikir dari segi pengetahuan ataupun cara pikir dari pandangan ke arah yang lebih rasional. Yang dapat di terima oleh beberapa orang. Dalam pembahasan disini pandangan intelektual muslim terhadap demokrasi di Indonesia sering menjadi perdebatan

antara pandangan pemerintah dan pandangan muslim yang berdasarkan syari'at Islam.

Awalnya pandangan tentang demokrasi ini berasal dari barat hal ini dapat menimbulkan pro dan kontra dari pandangan intelektual muslim, adapun paandangannya ada baiknya juga menggunakan demokrasi dikarenakan sesuai dengan syariat islam atau sesuai dengan ketentuan syura' adapun pandangan sebaliknya beranggapan bahwa ide demokrasi ini yang di bawa oleh barat bertujuan agar bisa lebih mengungguli dunia islam.

Ketika datang ke perdebatan tentang hubungan antara Islam dan demokrasi, umat Islam jatuh ke dalam tiga kubu yang berbeda. Kelompok pertama termasuk mereka yang sangat menentang demokrasi dalam bentuk apapun; Mereka yang mendukung demokrasi merupakan kelompok kedua; Selain itu, ada anggota kelompok ketiga yang berada di tengah-tengah, menerima beberapa aspek demokrasi sementara menolak yang lain. relativitas kebenaran dalam ruang demokrasi, yang menurutnya bertentangan dengan keyakinan umum umat Islam bahwa apa yang diturunkan Allah melalui Islam hanyalah kebenaran. (Ni'mah, 2016).

Diyakini bahwa agama adalah sistem kepercayaan yang mengajarkan kesetiaan vertikal sepenuhnya kepada Tuhan. Namun, demokrasi sebagai seni kekuasaan merupakan konsepsi tentang human goods yang selalu mengandaikan tawar-menawar horizontal antar sesama manusia dan merelatifkan pandangan dogmatis dan absolut. Semakin religius seseorang, semakin dia menyukai demokrasi. (Dan & Hamzani, 2019).

Kebebasan perilaku. Setiap orang bebas untuk mengekspresikan diri, termasuk ketidaktaatan dengan cara-cara berikut: berpacaran, perzinahan, menyebarkan pornografi, melakukan tindakan pornografi, melakukan homoseksualitas dan lesbianisme, dan kegiatan serupa lainnya. Landasan demokrasi Barat ini adalah sekularisme, atau pemisahan agama dan negara. (M. Basri, 2015).

Abu Muhammad Ashim Al-Maqdisi menulis dalam bukunya Ad-Dimuqratiyah diinun (agama demokrasi): Ketahuilah bahwa bahasa Yunani adalah sumber dari istilah mengerikan "demokrasi", bukan bahasa Arab. Akibatnya, demokrasi mengacu pada pemerintahan rakyat. Ini, menurut para penganutnya, adalah ciri sistem demokrasi yang paling khas, dan akibatnya, mereka selalu memujanya. Wahai saudaraku, sesungguhnya itu adalah sifat yang paling mendasar dari kekafiran, kemusyrikan, dan kejahatan. Hal ini juga sangat tidak sesuai dengan ajaran Islam dan millatut tauhid. kedaulatan rakyat sebagai asas terpenting demokrasi, sangat bertentangan dengan Islam (H. Basri, 2013).

Praktek syura, juga dikenal sebagai musyawarah, adalah salah satu ajaran fundamental Islam yang mengatur masyarakat, bangsa, dan negara. Kata al-Syura, al-Musyawah, dan al-Masyurah merupakan varian dari masdar fi'il (kata kerja) dan berasal dari kata syâwara-yusyâwuru, yang memiliki akar kata syin, waw, dan ra' dalam fa'ala pola. Struktur akar kata tersebut adalah “syâwurtu fulânan fi amrî”, yang berarti “menunjukkan dan mempersembahkan sesuatu” dan “mengambil sesuatu”. Perspektif Fulan tentang urusan saya diterima oleh saya. Penggunaan syura, atau musyawarah, adalah salah satu ajaran dasar Islam yang mengatur masyarakat, bangsa, dan negara. (Hanafi, 2013).

Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau MPR, adalah sistem parlementer Indonesia, dan berfungsi sebagai platform untuk suara dan pendapat warga negara. Seperti namanya, MPR mendapatkan namanya dari kata Arab syûrâ. Implementasi MPR di Indonesia dan konsep Syûrâ, yakni representasi suara rakyat sebagai partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait kepentingan publik melalui parlemen, memiliki kesamaan. Dalam Islam, musyawarah tidak boleh melanggar hak Allah dan Rasul-Nya. (Japarudin, 2015).

Dalam Ahmad, 1982:179, Al-Maududi menegaskan bahwa Islam bukanlah kumpulan ide dan perilaku yang berbeda-beda. Islam adalah sistem yang terorganisasi dengan baik berdasarkan seperangkat proposisi yang jelas yang bekerja sama untuk membentuk suatu kesatuan yang koheren. Seluruh cara hidup Islam didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental ini. Oleh karena itu, pertama-tama kita harus menyelidiki asal-usul dan prinsip-prinsip dasar ideologi Islam sebelum memeriksa segala aspeknya. Al-Maududi memandang pendirian negara Islam sebagai kebutuhan mutlak. (Ma'rif, 2016).

Islam adalah agama keadilan. mengutamakan keputusan akhir yang akan dibuat bersama. Pentingnya keputusan kolektif diajarkan bahkan pada masa Nabi Muhammad. bahkan contoh manusia untuk diikuti. Dari mereka yang berkuasa dan masyarakat itu sendiri, Rasulullah SAW mengajarkan kita pentingnya akhlak dalam pemerintahan yang baik.

Piagam Madinah merupakan salah satu contoh demokrasi pada masa pemerintahan Rasulullah SAW. Menurut piagam Madinah, tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin; satu-satunya hal yang membedakan seseorang dari yang lain adalah iman dan kesalehan mereka.. Bahkan piagam ini tidak mengandung pembelaan untuk umat Islam saja, akaj tetapi tidak melihat dari kaum mana seseorang berasal apakah Islam atau Yahudi, intinya apabila ada yang

melanggar hukum maka akan mendapatkan konsekuensinya tanpa harus melihat dari latar belakang.

Bagaimana pandangan intelektual muslim Indonesia tentang demokrasi tentu saja ada yang mendukung (Pro) ada juga yang tidak mendukung (Kontra). Hal ini biasanya selalu menjadi perdebatan, karena tidak bisa dipungkiri bahwa demokrasi ini bukan berasal dari pandangan Islam.

Akan tetapi, bisa kita lihat mana yang menjadi pro dan kontra dalam suatu sistem demokrasi pandangan muslim.

a. Pandangan yang bisa diterima menurut intelektual muslim tentang Demokrasi di Indonesia

Demokrasi itu mengutamakan keadilan, kebebasan dan mempunyai hak atau berhak bersuara. Dalam hal ini Islam juga mengutamakan ketiga hal tersebut apalagi Islam juga mengajarkan pengambilan keputusan bersama seperti musyawarah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika saat perang Badar, Perang Uhud dan sebagainya. Saat musyawarah ketika perang dimana Nabi beserta sahabat mendiskusikan taktik perang untuk kemenangan Islam. Selain itu juga musyawarah dalam memilih pemimpin untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW ketika itu ada perselisihan antara kaum Anshar dan kaum Muhajirin, pada akhirnya terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq hal ini juga merupakan praktik musyawarah di zaman Nabi Muhammad SAW.

b. Pandangan yang tidak bisa menerima menurut intelektual muslim tentang Demokrasi di Indonesia

Demokrasi bukan pemikiran dari Islam melainkan dari Barat. Mengikuti demokrasi berarti seseorang tersebut mengikuti kafir hal ini di haramkan atau sangat tegas tidak di perbolehkan karena menyerupai orang-orang kafir. Pada intinya Demokrasi ini mengutamakan suara bersama yang di ambil dari mana suara terbanyak berarti bukan di lihat dari kebenaran.

Demokrasi juga mengutamakan kedaulatan masyarakat karena pandangan tertinggi itu berasal dari rakyat, jika demokrasi berpandangan seperti ini maka tentu saja bertentangan dengan Islam sebab kedaulatan tertinggi itu hanya Allah SWT.

KESIMPULAN

Islam merupakan agama yang adil. Mengutamakan suatu keputusan akhir untuk diambil secara bersama-sama. Dalam Islam juga sudah mengajarkan arti pentingnya hak bersama seperti hak bersuara, mengutarakan pendapat, dan hak kebebasan dalam memilih. Di Indonesia dikenal dengan Istilah Demokrasi. Demokrasi adalah suatu sistem yang dianut oleh Indonesia. Rakyat diberi prioritas dalam sistem pemerintahan ini ketika membuat keputusan. karena rakyat juga menguasai kedaulatan tertinggi.

Dalam Islam, sistem demokrasi Indonesia memiliki kelebihan dan kekurangan. Ada yang sependapat dan ada yang tidak. Sudah menjadi hal biasa jika ada perbedaan dalam berpendapat ketika mengarah suatu pandangan antara pemerintahan dan Islam. Bukan berarti ada banyak pertikaian dikarenakan pendapat akan tetapi hanya untuk mengarahkan bagaimana seseorang untuk memilih apalagi kita sebagai umat Islam tentu saja berlandaskan dengan syari'at Islam.

Ada beberapa pendapat yang Intelektual muslim tentang Demokrasi di Indonesia. Ada pandangan yang bisa menerima demokrasi Indonesia karena Demokrasi itu mengutamakan keadilan Demokrasi bukan pemikiran dari Islam melainkan dari Barat. Mengikuti demokrasi berarti seseorang tersebut mengikuti kafir hal ini di haramkan atau sangat tegas tidak di perbolehkan karena menyerupai orang-orang kafir. Pada intinya Demokrasi ini mengutamakan suara bersama yang di ambil dari mana suara terbanyak berarti bukan di lihat dari kebenaran. Mengikuti demokrasi berarti seseorang tersebut mengikuti kafir hal ini di haramkan atau sangat tegas tidak di perbolehkan karena menyerupai orang-orang kafir. Pada intinya Demokrasi ini mengutamakan suara bersama yang di ambil dari mana suara terbanyak berarti bukan di lihat dari kebenaran.

Kebenaran hanya milik Allah SWT dan kedaulatan yang tertinggi juga hanya kepada Allah SWT. Adapun kita sebagai umat muslim yang hidup di negara menganut sistem Demokrasi tentu saja menjalankan sistem tersebut akan tetapi dengan catatan jangan sampai melanggar hukum atau syari'at Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanulloh, N. (2015). *Demokratisasi Desa* (Cetakan Pe). KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA.
- Basri, H. (2013). Pandangan Islam Terhadap Sistem Demokri. *AL-MUNZIR*, 6(1), 38–40.
- Basri, M. (2015). Hukum demokrasi dalam islam. *UMS*, 27(1), 1–21. <https://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article>
- Dan, N. K., & Hamzani, A. I. (2019). Relasi Agama dan Demokrasi. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, 6(4), 391–404. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i4.13745>
- Dr. I Putu Ari Astawa, S.Pt, M. (2017). Demokrasi Indonesia. *pendidikan tambusai*, 6 No 1.
- Hakim, A. A. (2011). *KONSEP DEMOKRASI* (Nomor 08230067). Universitas Muhammadiyah Malang.
- Hanafi, M. (2013). CITA HUKUM. *cita hukum*, 1(2).
- IDEA, I. (2018). *Global State of Democracy* (Demokrasi). Stromsborg.
- Istianto, B. (2011). *Demokratisasi birokrasi* (Edisi Pert). Mitra Wacana Media.
- Japarudin. (2015). DEMOKRASI PERSPEKTIF ISLAM Syura dan Kebebasan Berpendapat Studi Kasus Demokrasi di Indonesia. *El-Afkar*, 4(11), 156–157.
- Ma'rif, B. S. (2016). Demokrasi dalam islam pandangan al-maududi. *MIMBAR*, XIX(2), 169–178.
- Ni'mah, Z. A. (2016). Diskursus nasionalisme dan demokrasi perspektif islam. *moraref*, 10 No 1, 25–40. <http://jurnal.stainkediri.ac.id/index.p>
- Noviati, C. E. (2013). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Konstitusi Indexed By: JournalStories*, 10 No 2(32), 352.
- Penyusun, T. I. M. (2020). *Pemilu dan Demokrasi* (S. (Kasubbag K. Nanang Rachmana, S. Kom. (Kasubbag Program dan Data) Nandang, S.H, M.A (Kasubbag Hukum) Ade Sunarya & Design (ed.)). Komisi pemilihan umum kota bogor
- Ruhijat, T. R. (2019). *Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia* (Imran, F. R. Hidayati, & Sekretariat (ed.); Cetakan Pe). Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik

Indonesia.

Sunarso. (2015). *Membedah Demokrasi Indonesia* (L. Santoso (ed.); Edisi Pert). UNY Press.

Tambak, S. (2011). Pemikiran Pendidikan al-Ghazali. *Pusat Kajian Pendidikan Islam Jurusan Pendidikan Agama Islam*, 8(113), 77–78.